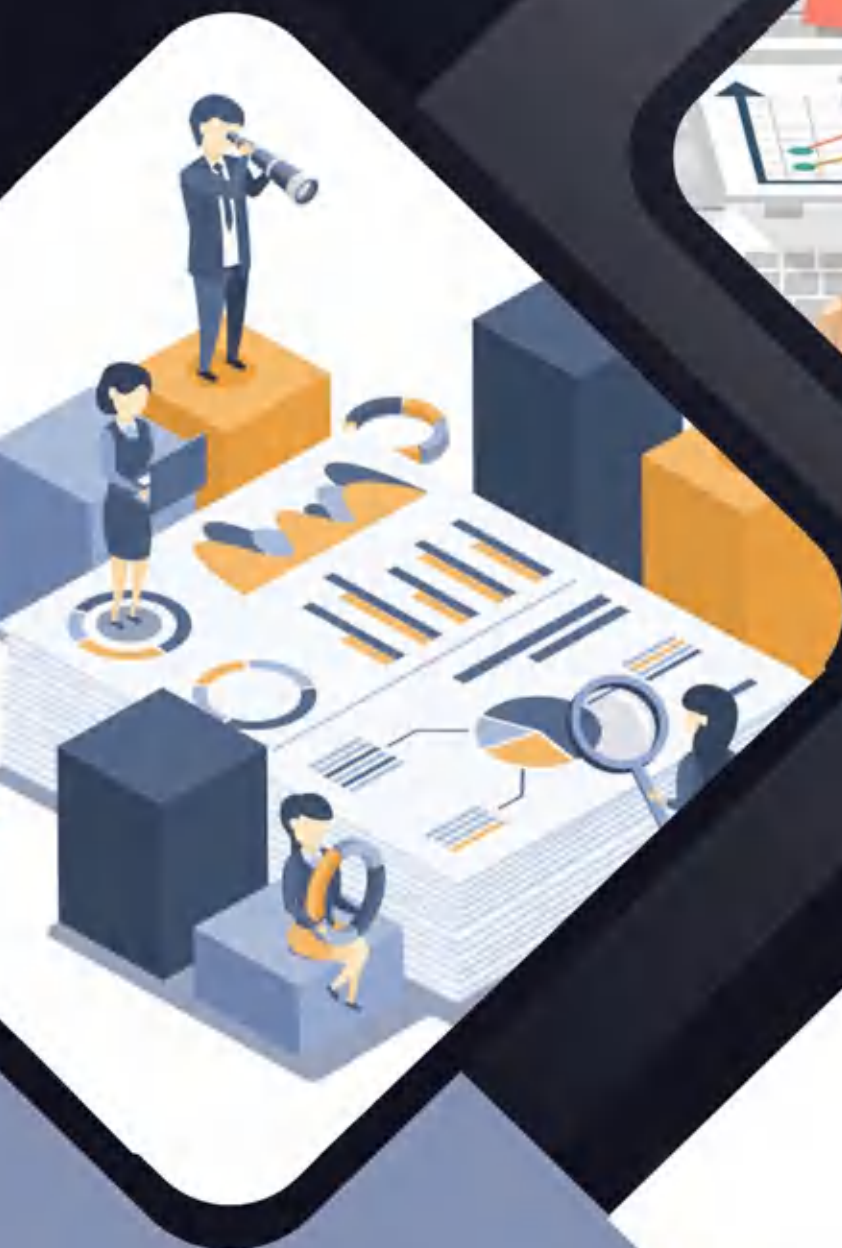


RENCANA KERJA 2021



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
3.3. Program dan Kegiatan	39
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 40
 BAB V PENUTUP.....	 52

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2019 dan Capaian Renstra Tahun 2018	8
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Tahun Anggaran 2019	21
2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020	24
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Tahun 2017-2022	38
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja BPKAD Tahun 2021 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah. Renja BPKAD Tahun 2021 merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2017-2022 sesuai arahan operasional dalam RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2021.

Renja BPKAD Tahun 2021 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKAD Tahun 2021 dan kemudian

berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2021. Renja BPKAD Tahun 2021 merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja BPKAD yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renja BPKAD Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11);
26. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 82).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja BPKAD Tahun 2021 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud
 - a. Menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta penganggaran yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2017-2022 untuk Tahun 2021;
 - b. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.
2. Tujuan
 - a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKAD Tahun 2021;
 - b. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja BPKAD Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun dasar hukum terkait tugas pokok dan fungsi BPKAD diatur dalam Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya, BPKAD mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2019 dan capaian renstra sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2019 dan Capaian Renstra Tahun 2018

Kode Rekening		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Target Renstra sampai dengan Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2019			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2019 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)		(2)	(3)		(4)		(5)			(6)		(7)		(8)		(9)	
4	04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan		38.567.306.818		8.251.656.818			9.166.107.381		8.562.317.739		93,41		16.813.974.557		43,60
44		Program Peningkatan Pelayanan Publik		40.000.000		-			10.000.000		9.346.280		93,46		9.346.280		23,37
	06	Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik	5	20.000.000	1	-	1	Dokumen	5.000.000	1	4.911.940	100	98,24	2	4.911.940	40	24,56
	336	Penyusunan SOP tentang Pelayanan Publik Pengelolaan Keuangan/ Aset Daerah	90	20.000.000	10	-	20	SOP	5.000.000	20	4.434.340	100	88,69	30	4.434.340	33	22,17
										Rata-rata capaian kinerja (%)		100					
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi					

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)		(2)	(3)		(4)		(5)			(6)		(7)		(8)		(9)	
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		9.210.631.816		1.486.611.816			1.876.030.460		1.775.179.281		94,62		3.261.791.097		35,41
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 0 48	18.000.000	800	3.600.000	52 0 12	Buah	3.600.000	900	3.600.000	173	100,0 0	17 00	7.200.000	43	40,00
								Buku		9		75		9		19	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	3.871.612.496	12	422.342.496	12	Bulan	558.000.000	12	496.220.230	100	88,93	24	918.562.726	40	23,73
	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	45	325.567.836	9	45.567.836	24	Unit	71.000.000	24	66.449.276	100	93,59	33	112.017.112	73	34,41
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	147	115.155.300	23	8.505.300	31	Unit	75.550.000	31	63.064.400	100	83,47	54	71.569.700	37	62,15
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 201 7	1.011.229.978	12 417	201.229.978	12 80 4	Bulan Buah	222.305.000	12 804	205.196.071	100 100	92,30	24 12 21	406.426.049	40 61	40,19
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103 41	169.155.400	234 1	63.155.400	22 44	Buah	81.000.000	220 6	80.924.925	98	99,91	45 47	144.080.325	44	85,18
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	406 27 106 .37 5 550	458.316.680	862 7 212 75 110	65.316.680	86 27 17 02 0 55	Buah Lembar Buku	72.600.000	789 2 100 00 162	72.328.465	91 59 295	99,63	16 51 9 31 27 5 27 2	137.645.145	41 29 49	30,03

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)		(2)	(3)		(4)		(5)			(6)		(7)		(8)		(9)	
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	990	59.995.200	270	9.995.200	40 5	Buah	15.000.000	405	14.998.750	100	99,99	67 5	24.993.950	68	41,66
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	462 8	118.522.900	102 8	73.522.900	99 6	Buah	79.200.000	825	79.127.180	83	99,91	18 53	152.650.080	40	128,7 9
	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	661	237.208.200	101	41.208.200	48 8	Buah	15.000.000	488	13.464.000	100	89,76	58 9	54.672.200	89	23,05
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	180 0 40	119.860.000	360 0	13.860.000	36 0 10	Eksemplar Kali	24.000.000	360 9	23.990.000	100 90	99,96	72 0 9	37.850.000	40 23	31,58
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	175 56 125 0	478.465.200	355 6 119 4	78.465.200	39 60 12 24	Dus Buah	96.875.460	264 7 130 8	96.722.010	67 107	99,84	62 03 25 02	175.187.210	35 200	36,61
	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	644	1.301.597.125	124	321.597.125	13 0	Kali	401.000.000	88	400.970.864	68	99,99	21 2	722.567.989	33	55,51
	21	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	8	893.645.501	4	133.645.501	4	Orang	152.400.000	4	149.673.110	100	98,21	8	283.318.611	100	31,70
	22	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	100	32.300.000	20	4.600.000	20	Paket	8.500.000	20	8.450.000	100	99,41	40	13.050.000	40	40,40
										Rata-rata capaian kinerja (%)		105					
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi					

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)		(2)	(3)		(4)		(5)			(6)		(7)		(8)		(9)	
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		7.168.738.845		2.110.988.845			1.609.847.000		1.285.425.514		79,85		3.396.414.359		47,38
	04	Pengadaan Mobil Jabatan	1	350.000.000	0	-	1	Unit	350.000.000	1	298.750.000	100	85,36	1	298.750.000	100	85,36
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	10	200.000.000	0	-	9	Unit	-	0	0	-		0	-	-	-
	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5	534.957.300	1	368.957.300	1	Unit	300.000.000	1	265.756.500	100	88,59	2	634.713.800	40	118,65
	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4	44.000.000	0	-	2	Unit	45.000.000	2	31.735.000	100	70,52	2	31.735.000	50	72,13
	10	Pengadaan Meubelair	31	287.784.500	3	86.784.500	16	Unit	-	0	0	-		3	86.784.500	10	30,16
	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	5	1.249.907.000	1	449.907.000	4	Paket	190.000.000	4	189.568.775	100	99,77	5	639.475.775	100	51,16
	23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	30	691.685.000	6	89.685.000	14	Kali	151.875.000	46	123.570.900	329	81,36	52	213.255.900	173	30,83
	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	65	534.499.146	13	105.559.146	21	Kali	132.945.000	80	126.258.049	381	94,97	93	231.817.195	143	43,37
	26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	59	168.785.205	3	36.625.205	44	Kali	123.600.000	51	58.196.190	116	47,08	54	94.821.395	92	56,18
	29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair	20	82.000.000	0	-	5	Kali	25.000.000	0	0	-	-	0	-	-	-
	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	280	222.140.000	40	13.140.000	172	Kali	80.400.000	57	27.910.100	33	34,71	97	41.050.100	35	18,48

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)		(2)	(3)		(4)		(5)			(6)		(7)		(8)		(9)	
	45	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	9	223.855.000	1	25.855.000	2	Paket	45.000.000	2	28.710.000	100	63,80	3	54.565.000	33	24,38
	48	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86	2.579.125.694	26	934.475.694	24	Unit	166.027.000	24	134.970.000	100	81,29	50	1.069.445.694	58	41,47
										Rata-rata capaian kinerja (%)		112					
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi					
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		208.256.250		28.256.250			45.000.000		36.179.000		80,40		64.435.250		30,94
	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	695	208.256.250	139	28.256.250	150	Potong	45.000.000	150	36.179.000	100	80,40	289	64.435.250	42	30,94
										Rata-rata capaian kinerja (%)		100					
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi					
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		90.000.000		-			-		0				-		-
	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	40	90.000.000	0	-	10	Orang	-	0	0	-		0	-	-	-
										Rata-rata capaian kinerja (%)		-					
										Predikat kinerja		Sangat Rendah					

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)		(2)	(3)		(4)		(5)			(6)		(7)		(8)		(9)	
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		361.155.800		61.155.800			65.000.000		63.494.730		97,68		124.650.530		34,51
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	74.749.800	1	14.749.800	1	Dokumen	10.000.000	1	9.338.900	100	93,39	2	24.088.700	40	32,23
	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	10	149.782.000	2	29.782.000	2	Dokumen	30.000.000	2	29.882.900	100	99,61	4	59.664.900	40	39,83
	03	Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah	10	116.624.000	2	16.624.000	2	Dokumen	20.000.000	2	19.776.350	100	98,88	4	36.400.350	40	31,21
	04	Penyelenggaraa n Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	5	20.000.000	1	-	1	Dokumen	5.000.000	1	4.496.580	100	89,93	2	4.496.580	40	22,48
										Rata-rata capaian kinerja (%)		100					
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi					
13		Program Perencanaan Kerja		98.300.180		30.300.180			30.000.000		29.738.200		99,13		60.038.380		61,08
	01	Penyusunan Rencana Kerja	5	49.531.900	1	9.531.900	1	Dokumen	10.000.000	1	9.921.200	100	99,21	2	19.453.100	40	39,27

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)		(2)	(3)		(4)		(5)			(6)		(7)		(8)		(9)	
	04	Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	20	48.768.280	4	20.768.280	4	Dokumen	20.000.000	4	19.817.000	100	99,09	8	40.585.280	40	83,22
										Rata-rata capaian kinerja (%)		100					
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi					
15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		15.655.661.141		3.390.061.141			4.123.180.800		4.035.064.685		97,86		7.425.125.826		47,43
	01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	5	343.172.646	1	178.172.646	1	Ranperda APBD	212.830.000	1	209.411.151	100	98,39	2	387.583.797	40	112,9 4
	02	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	5	245.344.467	1	116.344.467	1	Ranperwal Penjabaran APBD	122.960.000	1	120.380.084	100	97,90	2	236.724.551	40	96,49
	03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	5	901.378.628	1	191.378.628	1	Ranperda Perubahan APBD	215.840.000	1	214.911.141	100	99,57	2	406.289.769	40	45,07
	04	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	5	556.342.353	1	102.342.353	1	Ranperwal Penjabaran Perubahan APBD	133.300.000	1	131.160.582	100	98,40	2	233.502.935	40	41,97

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)		(2)	(3)		(4)		(5)			(6)		(7)		(8)		(9)	
	05	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	5	401.908.080	1	74.908.080	1	Ranperwal Pedoman Penyusunan APBD	101.260.000	1	100.267.890	100	99,02	2	175.175.970	40	43,59
	06	Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	5	613.837.754	1	163.837.754	1	Renperwal Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	138.330.000	1	136.765.388	100	98,87	2	300.603.142	40	48,97
	07	Verifikasi Dokumen Anggaran	500 0	352.755.410	100 0	106.755.410	30 97	RKA/ RKPA	99.730.000	309 7	98.949.970	100	99,22	40 97	205.705.380	82	58,31
	08	Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah	20	358.316.660	4	102.716.660	4	Dokumen	86.510.000	4	85.744.695	100	99,12	8	188.461.355	40	52,60
	09	Pengelolaan Data Anggaran	4	200.000.000	0	-	1	Dokumen	85.720.000	1	84.760.750	100	98,88	1	84.760.750	25	42,38
	11	Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi	5	471.298.451	1	163.298.451	1	Dokumen	148.520.000	1	146.114.573	100	98,38	2	309.413.024	40	65,65
	12	Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	500 0	594.521.823	100 0	184.521.823	14 00	SPD	248.751.040	485	219.467.055	35	88,23	14 85	403.988.878	30	67,95
			750 00		150 00		16 00 0	SP2D		180 00		113		33 00 0		44	
	13	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	82	973.760.050	41	178.760.050	41	Bendahara Pengeluaran	220.000.000	41	214.043.820	100	97,29	82	392.803.870	100	40,34
			28		14		14	Bendahara Penerimaan		14		100		28		100	

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)		(2)	(3)		(4)		(5)			(6)		(7)		(8)		(9)	
	14	Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	20	191.994.400	4	59.994.400	4	Dokumen	35.000.000	4	34.776.070	100	99,36	8	94.770.470	40	49,36
	15	Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian Perangkat Daerah	20	191.974.000	4	59.974.000	4	Dokumen	-	0	0	-		4	59.974.000	20	31,24
	16	Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya	510	714.466.731	102	164.466.731	102	Dus	170.000.000	102	169.469.487	100	99,69	204	333.936.218	40	46,74
	17	Pelaporan Pajak Orang Pribadi	7530	489.330.815	7500	69.330.815	7500	SPT	-	0	0	-		7500	69.330.815	100	14,17
	18	Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji	5	439.577.950	1	59.577.950	1	Dokumen	107.329.760	1	106.432.185	100	99,16	2	166.010.135	40	37,77
	19	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	20	430.868.710	4	70.868.710	4	Dokumen	200.000.000	4	199.704.050	100	99,85	8	270.572.760	40	62,80
	20	Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik	5	305.807.405	1	45.807.405	1	Dokumen	50.000.000	1	49.539.200	100	99,08	2	95.346.605	40	31,18
	21	Penatausahaan Dana Transfer	17	784.713.275	1	129.713.275	4	Dokumen	150.000.000	4	148.440.737	100	98,96	5	278.154.012	29	35,45
	22	Peningkatan Penatausahaan Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS	10	268.826.845	2	38.826.845	2	Dokumen	50.000.000	2	40.234.750	100	80,47	4	79.061.595	40	29,41

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)		(2)	(3)		(4)		(5)			(6)		(7)		(8)		(9)	
	23	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	5	1.077.707.041	1	197.707.041	1	Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	268.000.000	1	265.073.510	100	98,91	2	462.780.551	40	42,94
	24	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	5	538.226.817	1	98.226.817	1	Renperwal Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	200.000.000	1	190.694.738	100	95,35	2	288.921.555	40	53,68
	26	Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD	10	518.158.938	2	119.158.938	4	Dokumen	132.100.000	4	130.795.782	100	99,01	6	249.954.720	60	48,24
	28	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPKD	10	330.958.438	2	113.958.438	1	Dokumen	200.000.000	1	199.106.033	100	99,55	3	313.064.471	30	94,59
	29	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	5	602.615.000	1	252.615.000	1	Paket	525.000.000	1	520.080.000	100	99,06	2	772.695.000	40	128,22
	30	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK Perangkat Daerah dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual	184	950.097.269	92	198.097.269	92	Orang	32.000.000	92	30.939.425	100	96,69	184	229.036.694	100	24,11

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)		(2)	(3)		(4)		(5)			(6)		(7)		(8)		(9)	
	31	Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	4	409.000.000	0	-	2	Ranperwal	50.000.000	2	48.905.920	100	97,81	2	48.905.920	50	11,96
	32	Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	30	798.701.185	6	148.701.185	6	Kali	140.000.000	6	138.895.699	100	99,21	12	287.596.884	40	36,01
										Rata-rata capaian kinerja (%)		89					
										Predikat kinerja		Tinggi					
18		Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah		5.734.562.786		1.144.282.786			1.407.049.121		1.327.890.049		94,37		2.472.172.835		43,11
	01	Pembuatan Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya (Protasik)	4	306.000.000	0	-	1	Paket	106.000.000	1	104.951.000	100	99,01	1	104.951.000	25	34,30
	02	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	15	239.992.559	3	55.992.559	3	Dokumen	60.450.000	3	59.734.584	100	98,82	6	115.727.143	40	48,22
	03	Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	220	1.501.943.745	110	326.443.745	110	Orang	269.700.000	110	261.895.328	100	97,11	220	588.339.073	100	39,17
	04	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10	985.267.082	2	190.267.082	2	Dokumen	171.361.957	2	151.954.836	100	88,67	4	342.221.918	40	34,73

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)	(2)	(3)		(4)		(5)			(6)		(7)		(8)		(9)			
	05	Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah	30	828.565.200	6	163.565.200	7	Dok LBPT dan KIB (A, B,C, D, E dan F)	408.650.000	7	405.378.378	100	99,20	13	568.943.578	43	68,67	
	06	Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah	150	889.333.650	30	199.333.650	30	Sertifikat	265.887.164	0	224.981.841	-	84,62	30	424.315.491	20	47,71	
	07	Penilaian Barang Milik Daerah	5	579.336.550	1	135.336.550	1	Dokumen	125.000.000	1	118.994.082	100	95,20	2	254.330.632	40	43,90	
	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah	255	404.124.000	51	73.344.000	52	Papan Nama Aset	-	0	0	-		51	73.344.000	20	18,15	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		75						
										Predikat kinerja		Sedang						
						8.251.656.818				9.166.107.381		8.562.317.739		93,41	0	16.813.974.557	-	43,60
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												87						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Tinggi						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja BPKAD dari 3 sasaran dan 7 indikator yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Tahun Anggaran 2019

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	
1	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai			82	85	89	90	83,43	85,37	89	90	
2	Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai			75	77	79	81	73,64	74,06	79	81	
6	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level			2	3	3	3	2	2,5	3	3	
7	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%			100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan semua sumber daya yang ada, permasalahan dan hambatan yang menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/perangkat daerah terkait, belum maksimal dan belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi;
2. Belum optimalnya perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja BPKAD;
3. Integritas, kompetensi, disiplin, dan kinerja aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih perlu ditingkatkan;
4. Pelaksanaan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum maksimal;
5. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset daerah;
6. Belum maksimalnya pensertifikatan aset tetap tanah;
7. Belum optimalnya penatausahaan barang milik daerah.

Strategi yang digunakan dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mudah, cepat dan transparan berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan kualitas SDM Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Penguatan pemahaman dan komitmen terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
4. Meningkatkan integritas, kompetensi, disiplin, dan kinerja aparatur;
5. Mengintegrasikan sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset daerah;
6. Menambah sumber daya aparatur yang mengelola pensertifikatan aset tetap tanah;
7. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan rekonsiliasi pengelolaan barang milik daerah.

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai;

2. Penyediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan pelatihan/ bimbingan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja BPKAD;
3. Pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan tindakan manajerial dan kegiatan teknis;
4. Penyediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan pelatihan/ bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada Seluruh Pegawai;
5. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, BPKP dan Kemendagri;
6. Melaksanakan rotasi internal pegawai untuk menambah pengelola pensertifikatan tanah dan meningkatkan koordinasi yang baik dengan BPN Kota Tasikmalaya;
7. Penyediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan rekonsiliasi pengelolaan barang milik daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan BPKAD.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kode Rekening	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.04.4.04.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	100	1.561.085.800	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	100	1.561.085.800
4.04.4.04.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek	520 Buah dan 12 Buku	3.600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek	520 Buah dan 12 Buku	3.600.000
4.04.4.04.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon,air, listrik dan jasa layanan internet	12 Bulan	354.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon,air, listrik dan jasa layanan internet	12 Bulan	354.000.000
4.04.4.04.06.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan / bangunan kantor yang diasuransikan	24 Unit	87.100.000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan / bangunan kantor yang diasuransikan	24 Unit	87.100.000
4.04.4.04.06.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK	31 Unit	35.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK	31 Unit	35.950.000
4.04.4.04.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan Jumlah perlengkapan Kebersihan	12 Bulan	230.585.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan Jumlah perlengkapan Kebersihan	12 Bulan	230.585.000
4.04.4.04.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	1746 Buah	63.151.300	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	1746 Buah	63.151.300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.04.4.04.06.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan Jumlah penjiilidan	4.435 Buah 20.895 Lembar dan 110 Buku	60.685.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan Jumlah penjiilidan	4.435 Buah 20.895 Lembar dan 110 Buku	60.685.000
4.04.4.04.06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	405 Buah	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	405 Buah	15.000.000
4.04.4.04.06.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1.103 Buah	88.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1.103 Buah	88.000.000
4.04.4.04.06.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	190 Buah	28.014.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	190 Buah	28.014.500
4.04.4.04.06.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan Jumlah iklan media massa	360 Eksemplar dan 10 Kali	24.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan Jumlah iklan media massa	360 Eksemplar dan 10 Kali	24.000.000
4.04.4.04.06.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat dan jamuan tamu Jumlah makan dan minum harian	2760 Dus dan 1224 Buah	91.900.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat dan jamuan tamu Jumlah makan dan minum harian	2760 Dus dan 1224 Buah	91.900.000
4.04.4.04.06.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	136 Kali	251.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	136 Kali	251.000.000
4.04.4.04.06.01.21	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	4 Orang	156.000.000	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	4 Orang	156.000.000
4.04.4.04.06.01.22	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai	20 Paket	72.100.000	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai	20 Paket	72.100.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.04.4.04.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai standar	100	1.674.420.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai standar	100	1.674.420.000
4.04.4.04.06.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	20 Unit	445.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	20 Unit	445.000.000
4.04.4.04.06.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	1 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	1 Unit	50.000.000
4.04.4.04.06.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 Paket	228.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 Paket	228.000.000
4.04.4.04.06.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah frekuensi pemeliharaan mobil jabatan	45 Kali	151.875.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah frekuensi pemeliharaan mobil jabatan	45 Kali	151.875.000
4.04.4.04.06.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	80 Kali	122.945.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	80 Kali	122.945.000
4.04.4.04.06.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah frekuensi pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	50 Kali	123.600.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah frekuensi pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	50 Kali	123.600.000
4.04.4.04.06.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Frekuensi pemeliharaan rutin / berkala meubelair	5 Kali	25.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Frekuensi pemeliharaan rutin / berkala meubelair	5 Kali	25.000.000
4.04.4.04.06.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah frekuensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	55 Kali	60.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah frekuensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	55 Kali	60.000.000
4.04.4.04.06.02.45	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Jumlah jasa prasarana aparatur	2 Paket	49.000.000	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Jumlah jasa prasarana aparatur	2 Paket	49.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.04.4.04.06.02.48	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	57 Unit	419.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	57 Unit	419.000.000
4.04.4.04.06.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur	100	45.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur	100	45.000.000
4.04.4.04.06.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	150 Potong	45.000.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	150 Potong	45.000.000
4.04.4.04.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan	100	20.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan	100	20.000.000
4.04.4.04.06.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta	10 Orang	20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta	10 Orang	20.000.000
4.04.4.04.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	77 Ktgr (Point)	20.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	77 Ktgr (Point)	20.000.000
4.04.4.04.06.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Dokumen	5.000.000
4.04.4.04.06.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	2 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	2 Dokumen	5.000.000
4.04.4.04.06.06.03	Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan barang semesteran dan akhir tahun	2 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan barang semesteran dan akhir tahun	2 Dokumen	5.000.000

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.04.4.04.06.06.04	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SPIP	1 Dokumen	5.000.000	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SPIP	1 Dokumen	5.000.000
4.04.4.04.06.13	Program Perencanaan Kerja	Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	100	45.000.000	Program Perencanaan Kerja	Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	100	45.000.000
4.04.4.04.06.13.01	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah rencana kerja yang disusun	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah rencana kerja yang disusun	1 Dokumen	5.000.000
4.04.4.04.06.13.03	Penyusunan Perubahan Rencana Strategis	Jumlah perubahan rencana strategis yang disusun	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Perubahan Rencana Strategis	Jumlah perubahan rencana strategis yang disusun	1 Dokumen	5.000.000
4.04.4.04.06.13.04	Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan triwulanan	4 Dokumen	35.000.000	Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan triwulanan	4 Dokumen	35.000.000
4.04.4.04.06.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	100	4.133.000.000	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	100	4.133.000.000
4.04.4.04.06.15.01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	1 Ranperda APBD	215.840.000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	1 Ranperda APBD	215.840.000
4.04.4.04.06.15.02	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2020	1 Ranperwal Penjabaran APBD	222.060.000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2020	1 Ranperwal Penjabaran APBD	222.060.000

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.04.4.04.06.15.03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	1 Ranperda Perubahan APBD	215.840.000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	1 Ranperda Perubahan APBD	215.840.000
4.04.4.04.06.15.04	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	1 Ranperwal Penjabaran Perubahan APBD	122.060.000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	1 Ranperwal Penjabaran Perubahan APBD	122.060.000
4.04.4.04.06.15.06	Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Percepatan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019	1 Renperwal Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	141.590.000	Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Percepatan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019	1 Renperwal Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	141.590.000
4.04.4.04.06.15.07	Verifikasi Dokumen Anggaran	Jumlah dokumen anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya	3097 RKA/ RKPA	93.960.000	Verifikasi Dokumen Anggaran	Jumlah dokumen anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya	3097 RKA/ RKPA	93.960.000
4.04.4.04.06.15.09	Pengelolaan Data Anggaran	Jumlah dokumen data anggaran	1 Dokumen	85.120.000	Pengelolaan Data Anggaran	Jumlah dokumen data anggaran	1 Dokumen	85.120.000
4.04.4.04.06.15.05	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020	1 Ranperwal Pedoman Penyusun APBD	100.660.000	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020	1 Ranperwal Pedoman Penyusun APBD	100.660.000
4.04.4.04.06.15.08	Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi target anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019	4 Dokumen	85.910.000	Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi target anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019	4 Dokumen	85.910.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.04.4.04.06.15.11	Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi	Jumlah dokumen laporan penatausahaan bantuan keuangan provinsi	1 Dokumen	116.960.000	Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi	Jumlah dokumen laporan penatausahaan bantuan keuangan provinsi	1 Dokumen	116.960.000
4.04.4.04.06.15.12	Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen SPD dan Jumlah dokumen SP2D yang menunjang kelancaran penatausahaan keuangan daerah	400 SPD dan 16.000 SP2D	270.000.000	Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen SPD dan Jumlah dokumen SP2D yang menunjang kelancaran penatausahaan keuangan daerah	400 SPD dan 16.000 SP2D	270.000.000
4.04.4.04.06.15.13	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bendahara pengeluaran dan Jumlah bendahara penerimaan	41 Orang Bendahara Pengeluaran dan 14 Orang Bendahara Penerimaan	270.000.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bendahara pengeluaran dan Jumlah bendahara penerimaan	41 Orang Bendahara Pengeluaran dan 14 Orang Bendahara Penerimaan	270.000.000
4.04.4.04.06.15.14	Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah dokumen kendali pelaksanaan realisasi APBD	4 Dokumen	36.000.000	Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah dokumen kendali pelaksanaan realisasi APBD	4 Dokumen	36.000.000
4.04.4.04.06.15.15	Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rekapitulasi transaksi harian dari BUD	4 Dokumen	27.000.000	Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rekapitulasi transaksi harian dari BUD	4 Dokumen	27.000.000
4.04.4.04.06.15.16	Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jumlah leger gaji pegawai pada sistem penggajian	102 Dus	140.000.000	Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jumlah leger gaji pegawai pada sistem penggajian	102 Dus	140.000.000
4.04.4.04.06.15.17	Pelaporan Pajak Orang Pribadi	Jumlah SPT pelaporan pajak orang pribadi	7500 SPT	45.000.000	Pelaporan Pajak Orang Pribadi	Jumlah SPT pelaporan pajak orang pribadi	7500 SPT	45.000.000
4.04.4.04.06.15.18	Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji	Jumlah dokumen laporan tahunan PPh Pasal 21 khusus gaji	1 Dokumen	110.000.000	Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji	Jumlah dokumen laporan tahunan PPh Pasal 21 khusus gaji	1 Dokumen	110.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.04.4.04.06.15.19	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah dokumen laporan pemberian hibah dan bantuan sosial	4 Dokumen	300.000.000	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah dokumen laporan pemberian hibah dan bantuan sosial	4 Dokumen	300.000.000
4.04.4.04.06.15.20	Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah dokumen laporan bantuan keuangan partai politik	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah dokumen laporan bantuan keuangan partai politik	1 Dokumen	50.000.000
4.04.4.04.06.15.21	Penatausahaan Dana Transfer	Jumlah dokumen laporan realisasi dana transfer	4 Dokumen	135.000.000	Penatausahaan Dana Transfer	Jumlah dokumen laporan realisasi dana transfer	4 Dokumen	135.000.000
4.04.4.04.06.15.22	Peningkatan Penatausahaan Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS	Jumlah dokumen laporan SP2B JKN FKTF dan SP2B BOS	2 Dokumen	45.000.000	Peningkatan Penatausahaan Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS	Jumlah dokumen laporan SP2B JKN FKTF dan SP2B BOS	2 Dokumen	45.000.000
4.04.4.04.06.15.23	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	1 Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	300.000.000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018	1 Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	300.000.000
4.04.4.04.06.15.24	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	1 Renperwal Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	150.000.000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018	1 Renperwal Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	150.000.000
4.04.4.04.06.15.28	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPKD Tahun Anggaran 2018	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPKD Tahun Anggaran 2018	1 Dokumen	200.000.000

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.04.4.04.06.15.30	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK Perangkat Daerah dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual	Jumlah PPK Perangkat Daerah, PPKD, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan	92 Orang	120.000.000	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK Perangkat Daerah dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual	Jumlah PPK Perangkat Daerah, PPKD, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan	92 Orang	120.000.000
4.04.4.04.06.15.26	Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya TA 2019	4 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi pertanggungjawaban APBD TA 2019	4 Dokumen	200.000.000
4.04.4.04.06.15.29	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jasa konsultasi pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1 Paket	200.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jasa konsultasi pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1 Paket	200.000.000
4.04.4.04.06.15.32	Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	Jumlah sidang pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	6 Kali	135.000.000	Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	Jumlah sidang pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	6 Kali	135.000.000
4.04.4.04.06.18	Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100	1.919.087.200	Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100	1.919.087.200
4.04.4.04.06.18.02	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah(DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Rencana Hibah BMD	3 Dokumen	41.587.200	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah(DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah(DKPBMD) dan Daftar Rencana Hibah BMD	3 Dokumen	41.587.200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.04.4.04.06.18.03	Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang yang menjadi peserta pembinaan teknis penatausahaan barang milik daerah	110 Orang	270.000.000	Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang yang menjadi peserta pembinaan teknis penatausahaan barang milik daerah	110 Orang	270.000.000
4.04.4.04.06.18.04	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemindahtanganan dan penghapusan	2 Dokumen	135.000.000	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemindahtanganan dan penghapusan	2 Dokumen	135.000.000
4.04.4.04.06.18.05	Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah	Jumlah dokumen pencatatan aset / barang milik daerah	6 Dok KIB (A, B,C, D, E dan F)	540.000.000	Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah	Jumlah dokumen pencatatan aset / barang milik daerah	6 Dok KIB (A, B,C, D, E dan F)	540.000.000
4.04.4.04.06.18.01	Pembuatan Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya (Protasik)	Jumlah paket profil tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	1 Paket	90.000.000	Pembuatan Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya (Protasik)	Jumlah paket profil tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	1 Paket	90.000.000
4.04.4.04.06.18.06	Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	30 Sertifikat	330.000.000	Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	30 Sertifikat	330.000.000
4.04.4.04.06.18.07	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian BMD	1 Sertifikat	112.500.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian BMD	1 Sertifikat	112.500.000
4.04.4.04.06.18.08	Pengadaan Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah pengadaan mobil jabatan	1 Unit	400.000.000	Pengadaan Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah pengadaan mobil jabatan	1 Unit	400.000.000
4.01.4.04.06.44	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Capaian IKM Perangkat Daerah	85	10.000.000	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Capaian IKM Perangkat Daerah	85	10.000.000
4.01.4.04.06.44.06	Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil survey	1 Dokumen	5.000.000	Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil survey	1 Dokumen	5.000.000
4.01.4.04.06.44.336	Penyusunan SOP tentang Pelayanan Publik Pengelolaan Keuangan/ Aset Daerah	Jumlah dokumen SOP yang disusun	20 SOP	5.000.000	Penyusunan SOP tentang Pelayanan Publik Pengelolaan Keuangan/ Aset Daerah	Jumlah dokumen SOP yang disusun	20 SOP	5.000.000

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Keuangan adalah "Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif"

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif

Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien

Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel

Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif

Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah;

2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan;
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi BPKAD Kota Tasikmalaya untuk :

1. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien.
2. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, BPKAD mendukung untuk mewujudkan Visi “KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”. Visi tersebut mengandung makna :

Religius : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

Maju : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan

Madani : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal.
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

BPKAD bertanggungjawab untuk mendukung Misi ke 5 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

Selanjutnya BPKAD, dalam mewujudkan pencapaian Misi ke 5 tersebut mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kota Tasikmalaya yaitu tujuan ke delapan dari misi ke lima yaitu terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi, dengan sasaran :

1. Sasaran ke lima belas yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Strategi :

Meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan melalui Program Tasik Layanan Prima.

Kebijakan :

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan serta penyediaan sarana prasarana yang memadai;
 - 2) Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
2. Sasaran ke enam belas yaitu Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.

Strategi :

Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan aparatur yang berorientasi pada hasil dan kinerja.

Kebijakan :

- 1) Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang proporsional, efektif efisien, transparan dan akuntabel;
- 2) Peningkatan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta memacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah.

Dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD beserta indikator kinerjanya yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKAD Tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD
Tahun 2021-2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN		TARGET AKHIR RENSTRA
					2021	2022	
1	Terwujudnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	61-70 (B)	61-70 (B)	61-70 (B)
		Meningkatnya kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	77-88 (Baik)	77-88 (Baik)	77-88 (Baik)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori (Poin)	A (83)	A (84)	A (84)
2	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	70	72	72
		Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel	Opini BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya	Opini	WTP	WTP	WTP

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2021 BPKAD akan menjalankan 3 Program dengan 13 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif BPKAD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Kode Ring					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
									APBD Kota	APBD Provinsi		APBN			Jumlah
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				30.796.511.006			30.796.511.006			34.078.111.006
5	02				KEUANGAN				30.796.511.006			30.796.511.006			34.078.111.006
5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian IKM Perangkat Daerah	BPKAD	77-88 (Baik)	3.137.650.000			3.137.650.000		77-88 (Baik)	3.192.600.000
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BPKAD	A (83)	9.919.506.346			9.919.506.346		A (84)	9.941.506.346
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah BPKAD	BPKAD	4 Dokumen	175.100.000			175.100.000		4 Dokumen	185.100.000
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	2 Dokumen	10.000.000			10.000.000		2 Dokumen	10.000.000
5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan/ bangunan kantor yang diasuransikan	BPKAD	24 Unit	95.100.000			95.100.000		24 Unit	95.100.000
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun	BPKAD	2 Dokumen	70.000.000			70.000.000		2 Dokumen	80.000.000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kepegawaian BPKAD	BPKAD	12 Dokumen	33.611.000			33.611.000		12 Dokumen	43.000.000
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari tertentu pegawai	BPKAD	70 Buah	23.611.000			23.611.000		80 Buah	28.000.000
5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monev penilaian kinerja pegawai	BPKAD	12 Dokumen	10.000.000			10.000.000		12 Dokumen	15.000.000

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu penyelenggaraan pelayanan administrasi umum BPKAD	BPKAD	12 Bulan	1.018.522.500			1.018.522.500		12 Bulan	995.000.000
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	BPKAD	12 Jenis	15.000.000			15.000.000		20 Jenis	20.000.000
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor Jumlah perlengkapan kantor	BPKAD	31 Jenis 16 Unit	435.067.000			435.067.000		35 Jenis	350.000.000
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	BPKAD	22 Jenis	25.455.500			25.455.500		25 Jenis	30.000.000
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jasa prasarana aparatur	BPKAD	29 Jenis	50.000.000			50.000.000		30 Jenis	65.000.000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan Jumlah penjiilidan	BPKAD	8 Jenis, 15444 Lembar, 100 Buku	53.000.000			53.000.000		10 Jenis, 16550 Lembar, 110 Buku	65.000.000
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan iklan media massa	BPKAD	264 Eksemplar dan 10 Kali	25.000.000			25.000.000		264 Eksemplar dan 12 Kali	30.000.000
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor	BPKAD	18 Jenis	60.000.000			60.000.000		20 Jenis	65.000.000
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum rapat, jamuan tamu dan makan minum harian	BPKAD	2854 Dus	85.000.000			85.000.000		2895 Dus	95.000.000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BPKAD	80 Kali	250.000.000			250.000.000		80 Kali	250.000.000
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen yang diarsipkan	BPKAD	12 Dokumen	10.000.000			10.000.000		12 Dokumen	15.000.000
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengelolaan website/aplikasi/ sistem informasi	BPKAD	1 Website	10.000.000			10.000.000		1 Website	10.000.000

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	BPKAD	12 Buah	340.000.000			340.000.000		12 Buah	320.000.000
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair kantor	BPKAD	12 Buah	160.000.000			160.000.000		12 Buah	195.000.000
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	BPKAD	1 Paket	180.000.000			180.000.000		1 Paket	125.000.000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa perkantoran	BPKAD	12 Bulan	930.076.000			930.076.000		12 Bulan	989.500.000
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek	BPKAD	492 Buah dan 9 Buah	4.000.000			4.000.000		525 Buah dan 12 Buah	6.500.000
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa telepon dan listrik	BPKAD	12 Bulan	396.000.000			396.000.000		12 Bulan	398.000.000
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah frekuensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD	24 Kali	58.000.000			58.000.000		24 Kali	60.000.000
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa keamanan dan ketertiban kantor Jumlah jasa kebersihan kantor Jumlah jasa Supir Kepala Badan	BPKAD	4 Orang 6 Orang 1 Orang	472.076.000			472.076.000		4 Orang 6 Orang 1 Orang	525.000.000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	BPKAD	91 Unit	640.340.500			640.340.500		91 Unit	660.000.000
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	BPKAD	20 Unit	281.000.000			281.000.000		20 Unit	285.000.000

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara	BPKAD	4 Unit	119.340.500			119.340.500		4 Unit	125.000.000
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubelair kantor yang dipelihara	BPKAD	66 Buah	20.000.000			20.000.000		66 Buah	25.000.000
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	BPKAD	1 Unit	220.000.000			220.000.000		1 Unit	225.000.000
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja BPKAD	BPKAD	13 Dokumen	200.000.000			200.000.000		13 Dokumen	200.000.000
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja	BPKAD	2 Dokumen	75.000.000			75.000.000		2 Dokumen	75.000.000
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	BPKAD	12 RKA	15.000.000			15.000.000		1 Dokumen	15.000.000
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	BPKAD	12 RKAP	15.000.000			15.000.000		1 Dokumen	15.000.000
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan SPIP, dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan, dokumen hasil survei kepuasan masyarakat, dokumen Reformasi Birokrasi, dan dokumen Zona Integritas	BPKAD	9 Dokumen	95.000.000			95.000.000		9 Dokumen	95.000.000

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan BPKAD	BPKAD	10 Dokumen	9.719.506.346			9.719.506.346		10 Dokumen	9.741.506.346
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan	BPKAD	12 Bulan	9.616.506.346			9.616.506.346		12 Bulan	9.616.506.346
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	BPKAD	4 Dokumen	13.000.000			13.000.000		4 Dokumen	15.000.000
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	BPKAD	4 Dokumen	15.000.000			15.000.000		4 Dokumen	20.000.000
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	BPKAD	1 Dokumen	60.000.000			60.000.000		1 Dokumen	70.000.000
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	BPKAD	1 Dokumen	15.000.000			15.000.000		1 Dokumen	20.000.000
5	02	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	BPKAD	100%	1.916.000.000			1.916.000.000		100%	2.840.000.000
						Persentase realisasi belanja terhadap target belanja yang telah ditetapkan	BPKAD	95%	11.534.004.660			11.534.004.660		95%	12.009.004.660
						Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP	BPKAD	100%	1.745.000.000			1.745.000.000		100%	2.095.000.000
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penganggaran keuangan daerah	BPKAD	23 Dokumen	1.916.000.000			1.916.000.000		23 Dokumen	2.840.000.000
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	BPKAD	2 Dokumen	195.800.000			195.800.000		2 Dokumen	300.000.000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	2 Dokumen	195.800.000			195.800.000		2 Dokumen	300.000.000

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	BPKAD	300 RKA	45.350.000			45.350.000		300 RKA	70.000.000
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	BPKAD	300 RKA	44.350.000			44.350.000		300 RKA	70.000.000
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	BPKAD	300 DPA	44.350.000			44.350.000		300 DPA	70.000.000
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	BPKAD	300 DPA	44.350.000			44.350.000		300 DPA	70.000.000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Ranperda APBD dan Ranperwal Penjabaran APBD	BPKAD	1 Ranperda dan 1 Ranperwal	207.300.000			207.300.000		1 Ranperda dan 1 Ranperwal	300.000.000
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Ranperda Perubahan APBD, Ranperwal Penjabaran Perubahan APBD, dan Ranperwal Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	BPKAD	1 Ranperda dan 2 Ranperwal	207.300.000			207.300.000		1 Ranperda dan 2 Ranperwal	450.000.000
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi bidang anggaran	BPKAD	4 Dokumen	798.350.000			798.350.000		4 Dokumen	800.000.000
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen perencanaan anggaran pendapatan	BPKAD	4 Dokumen	44.350.000			44.350.000		2 Dokumen	70.000.000
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran belanja daerah	BPKAD	4 Dokumen	44.350.000			44.350.000		2 Dokumen	70.000.000
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen perencanaan anggaran pembiayaan	BPKAD	2 Dokumen	44.350.000			44.350.000		2 Dokumen	70.000.000

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD							1 Kali	200.000.000
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan daerah	BPKAD	160 Dokumen	1.004.000.000			1.004.000.000		50 Dokumen	1.254.000.000
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen B9	BPKAD	12 Dokumen	25.000.000			25.000.000		12 Dokumen	50.000.000
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen anggaran kas SKPD, Jumlah SPD terbit	BPKAD	380 Dokumen dan 380 SPD	25.000.000			25.000.000		380 Dokumen dan 380 SPD	50.000.000
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi hibah dan bansos	BPKAD	4 Dokumen	100.000.000			100.000.000		4 Dokumen	100.000.000
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen laporan pengelolaan dana transfer	BPKAD	4 Dokumen	115.000.000			115.000.000		4 Dokumen	265.000.000
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas Tim Satgas TP2DD	BPKAD	4 Dokumen	65.000.000			65.000.000		4 Dokumen	65.000.000

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen ledger gaji yang diterbitkan	BPKAD	12 Dokumen	359.000.000			359.000.000		12 Dokumen, 450 SKPP, 17500 SP2 D, 17500 SPP SPM	359.000.000
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen laporan rekonsiliasi BPJS	BPKAD	12 Dokumen	115.000.000			115.000.000		12 Dokumen	115.000.000
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Rancangan SK tentang PA/PB, KPA/KPB, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu	BPKAD	80 Rancangan SK	50.000.000			50.000.000		80 Rancangan SK	100.000.000
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	100 Orang	150.000.000			150.000.000		100 Orang	150.000.000
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	1 Tahun	10.530.004.660			10.530.004.660		1 Tahun	10.755.004.660
5	02	02	2.04	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah pemberian subsidi	BPKAD	1 Tahun	250.000.000			250.000.000			275.000.000
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah pemberian dana darurat dan mendesak	BPKAD	1 Tahun	10.280.004.660			10.280.004.660			10.480.004.660

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	02	02	2.03		Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan daerah	BPKAD	20 Dokumen	1.745.000.000			1.745.000.000		20 Dokumen	2.095.000.000
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	BPKAD	2 Dokumen	100.000.000			100.000.000		2 Dokumen	150.000.000
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	BPKAD	12 Dokumen	100.000.000			100.000.000		12 Dokumen	150.000.000
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPKD	BPKAD	1 Dokumen	125.000.000			125.000.000		1 Dokumen	175.000.000
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperwal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	1 Ranperda dan 1 Ranperwal	350.000.000			350.000.000		1 Ranperda dan 1 Ranperwal	400.000.000
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	BPKAD	2 Dokumen	200.000.000			200.000.000		2 Dokumen	250.000.000

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah laporan indeks pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	1 Dokumen	100.000.000			100.000.000		1 Dokumen	150.000.000
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	92 Orang	770.000.000			770.000.000		92 Orang	820.000.000
5	02	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase inventarisasi aset milik daerah	BPKAD	100%	2.544.350.000			2.544.350.000		100%	4.000.000.000
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	BPKAD	81 Dokumen	2.544.350.000			2.544.350.000		81 Dokumen	4.000.000.000
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga Pemerintah Kota Tasikmalaya	BPKAD	1 Dokumen	149.242.000			149.242.000		1 Dokumen	250.000.000
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	BPKAD	1 Dokumen	19.235.000			19.235.000		1 Dokumen	150.000.000
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Rencana Hibah Barang Milik Daerah serta Jumlah pengadaan mobil jabatan	BPKAD	3 Dokumen dan 1 Unit	856.848.000			856.848.000		3 Dokumen dan 1 Unit	1.000.000.000
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang Perangkat Daerah	BPKAD	36 Dokumen	302.045.000			302.045.000		36 Dokumen	500.000.000

RENJA BPKAD TAHUN 2021

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi BMD	BPKAD	2 Dokumen	57.704.000			57.704.000		2 Dokumen	150.000.000
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya, jumlah dokumen titik koordinat dan pengamanan barang milik daerah	BPKAD	30 Sertifikat, 1 Dokumen dan 1 Tahun	456.469.000			456.469.000		100 Sertifikat, 1 Dokumen dan 1 Tahun	750.000.000
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian BMD	BPKAD	2 Dokumen	76.939.000			76.939.000		2 Dokumen	150.000.000
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemindahtanganan barang milik daerah	BPKAD	2 Dokumen	241.174.000			241.174.000		2 Dokumen	400.000.000
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah	BPKAD	1 Dokumen	76.939.000			76.939.000		1 Dokumen	150.000.000
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah dari SKPD	BPKAD	2 Dokumen	76.939.000			76.939.000		2 Dokumen	150.000.000
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan pengelolaan barang milik daerah	BPKAD	100 Orang	230.816.000			230.816.000		100 Orang	350.000.000

BAB V

PENUTUP

Renja BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2021 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan pada Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2017-2022 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Tasikmalaya serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2021.

Pada Tahun 2021, BPKAD telah merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 3 program dan 13 kegiatan. Dengan disusunnya dokumen Renja ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di BPKAD dapat lebih matang sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberikan kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kota Tasikmalaya.

Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari Pimpinan dan seluruh Pegawai di BPKAD merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Renja BPKAD Tahun 2021 menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja BPKAD.

Dengan tersusunnya Renja BPKAD Tahun 2021 ini, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan, serta dapat menentukan skala prioritas dengan melaksanakan program dan kegiatan yang sifatnya penting guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan dapat meningkatkan kinerja BPKAD pada Tahun 2021.

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



HANAFI, SH., MH
NIP. 19680705 199203 1 011



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 050.13/Kep.99 -Bappelitbangda/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2021**

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibentuk tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11);
8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

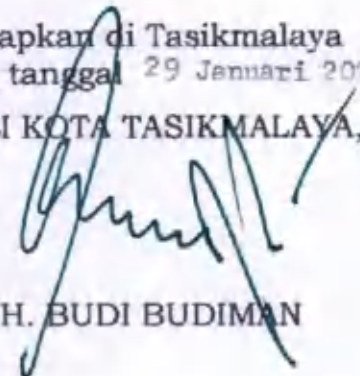
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan Persiapan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan Forum Perangkat Daerah;
 - d. merumuskan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - e. menyampaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk diverifikasi dan diproses penetapannya dalam Peraturan Walikota.
- KETIGA : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka dibentuk Sekretariat Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Januari 2020

WALI KOTA TASIKMALAYA,



H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 050.13/Kep.99-Bappelitbangda/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PERANGKATDAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYATAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan;
 2. Para Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan;
 3. Para Kepala Sub. Bagian Pada Dinas Pendidikan;
 4. Pelaksana pada Dinas Pendidikan;
 5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

2. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan;
 2. Para Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan;
 3. Para Kepala Sub. Bagian pada Dinas Kesehatan;
 4. Pelaksana pada Dinas Kesehatan;
 5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

3. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RSUD dr. SOEKARDJO KOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Direktur RSUD dr. Soekardjo.
2. Sekretaris : Wakil Direktur Umum RSUD dr. Soekardjo.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi pada RSUD dr. Soekardjo.

4. Anggota : 1. Para Wakil Direktur Pada RSUD dr. Soekardjo;
2. Para Kepala Bidang pada RSUD dr. Soekardjo;
3. Para Kepala Bagian pada RSUD dr. Soekardjo;
4. Para Kepala Seksi pada RSUD dr. Soekardjo;
5. Para Kepala Sub. Bagian Pada RSUD dr. Soekardjo;
6. Pelaksana pada RSUD dr. Soekardjo;
7. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

4. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Para Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Para Kepala Sub. Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

5. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
4. Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2. Para Kepala Seksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
3. Para Kepala Sub. Bagian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
4. Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

6. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 2. Para Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 3. Para Kepala Sub. Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 4. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

7. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 2. Para Kepala Seksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 3. Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

8. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Anggota :
 1. Para Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

9. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Dinas Sosial.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Sosial;
 2. Para Kepala Seksi pada Dinas Sosial;
 3. Para Kepala Sub. Bagian pada Dinas Sosial;
 4. Pelaksana pada Dinas Sosial;
 5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

10. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja;
 2. Para Kepala Seksi pada Dinas Tenaga Kerja;
 3. Para Kepala Sub. Bagian pada Dinas Tenaga Kerja;
 4. Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja;
 5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

11. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 2. Para Kepala Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 3. Para Kepala Sub. Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 4. Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

12. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup;
 2. Para Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup;
 3. Para Kepala Sub. Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup;
 4. Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup;
 5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

13. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Para Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. Para Kepala Sub. Bagian Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

14. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Para Kepala Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Para Kepala Sub. Bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

15. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan.
4. Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan;
2. Para Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan;
3. Para Kepala Sub. Bagian pada Dinas Perhubungan;
4. Pelaksana pada Dinas Perhubungan;
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

16. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Para Kepala Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Para Kepala Sub. Bagian Pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

17. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 2. Para Kepala Seksi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Para Kepala Sub. Bagian Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 4. Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro; Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
 5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

18. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Para Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Para Kepala Sub. Bagian Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

19. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 2. Para Kepala Seksi pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 3. Para Kepala Sub. Bagian pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 4. Pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

20. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 2. Para Kepala Seksi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 3. Para Kepala Sub. Bagian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 4. Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

21. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Sekretaris Daerah.
2. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Daerah.
4. Anggota :
 1. Para Asisten pada Sekretariat Daerah;
 2. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 3. Para Kepala Sub. Bagian pada Sekretariat Daerah;
 4. Pelaksana pada Sekretariat Daerah;
 5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

22. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Sekretaris DPRD.
2. Sekretaris : Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Sekretariat DPRD.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD;
 2. Para Kepala Sub. Bagian pada Sekretariat DPRD;
 3. Pelaksana pada Sekretariat DPRD;
 4. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

23. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Camat Cihideung.
2. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Cihideung.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Cihideung.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Cihideung;
 2. Para Kepala Sub. Bagian pada Kecamatan Cihideung;
 3. Pelaksana pada Kecamatan Cihideung;
 4. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

24. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Camat Kecamatan Cipedes.
2. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Cipedes.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Cipedes.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Cipedes;
 2. Para Kepala Sub. Bagian pada Kecamatan Cipedes;
 3. Pelaksana pada Kecamatan Cipedes;
 4. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

25. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Camat Kecamatan Tawang.
2. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Tawang.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Tawang.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Tawang;
 2. Para Kepala Sub. Bagian pada Kecamatan Tawang;
 3. Pelaksana pada Kecamatan Tawang;
 4. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

26. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Camat Indihiang.
2. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Indihiang.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Indihiang.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Indihiang;
 2. Para Kepala Sub. Bagian pada Kecamatan Indihiang;
 3. Pelaksana pada Kecamatan Indihiang;
 4. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

27. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Camat Kawalu.
2. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Kawalu.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Kawalu.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Kawalu;
 2. Para Kepala Sub. Bagian pada Kecamatan Kawalu;
 3. Pelaksana pada Kecamatan Kawalu;
 4. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

28. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Camat Cibeureum.
2. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Cibeureum.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Cibeureum.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Cibeureum;
 2. Para Kepala Sub. Bagian pada Kecamatan Cibeureum;
 3. Pelaksana pada Kecamatan Cibeureum;
 4. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

29. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Camat Tamansari.
2. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Tamansari.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Tamansari.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Tamansari;
 2. Para Kepala Sub. Bagian pada Kecamatan Tamansari;
 3. Pelaksana pada Kecamatan Tamansari;
 4. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

30. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Camat Mangkubumi.
2. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Mangkubumi.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Mangkubumi.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Mangkubumi;
 2. Para Kepala Sub. Bagian pada Kecamatan Mangkubumi;
 3. Pelaksana pada Kecamatan Mangkubumi;
 4. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

31. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Camat Bungursari.
2. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Bungursari.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Bungursari.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Bungursari;
 2. Para Kepala Sub. Bagian pada Kecamatan Bungursari;
 3. Pelaksana pada Kecamatan Bungursari;
 4. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

32. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PURBARATU KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Camat Purbaratu.
2. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Purbaratu.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Purbaratu.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Purbaratu;
 2. Para Kepala Sub. Bagian pada Kecamatan Purbaratu;
 3. Pelaksana pada Kecamatan Purbaratu;
 4. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

33. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Inspektur Kota Tasikmalaya.
2. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat.
4. Anggota :
 1. Para Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat;
 2. Para Kepala Sub. Bagian pada Inspektorat;
 3. Fungsional pada Inspektorat;
 4. Pelaksana pada Inspektorat;
 5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

34. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Para Kepala Sub. Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 3. Para Kepala Sub. Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 4. Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 5. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 6. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

35. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Para Kepala Sub. Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Para Kepala Sub. Bagian Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

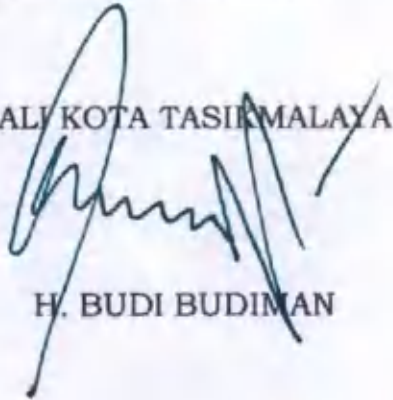
36. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah.
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah;
 2. Para Kepala Sub. Bidang pada Badan Pendapatan Daerah;
 3. Para Kepala Sub. Bagian Pada Badan Pendapatan Daerah;
 4. Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah;
 5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

37. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Para Kepala Sub. Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Para Kepala Sub. Bagian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

WALI KOTA TASIKMALAYA,



H. BUDI BUDIMAN